

**PERAN KELEMBAGAAN PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKSI KAKAO DI KABUPATEN PINRANG**

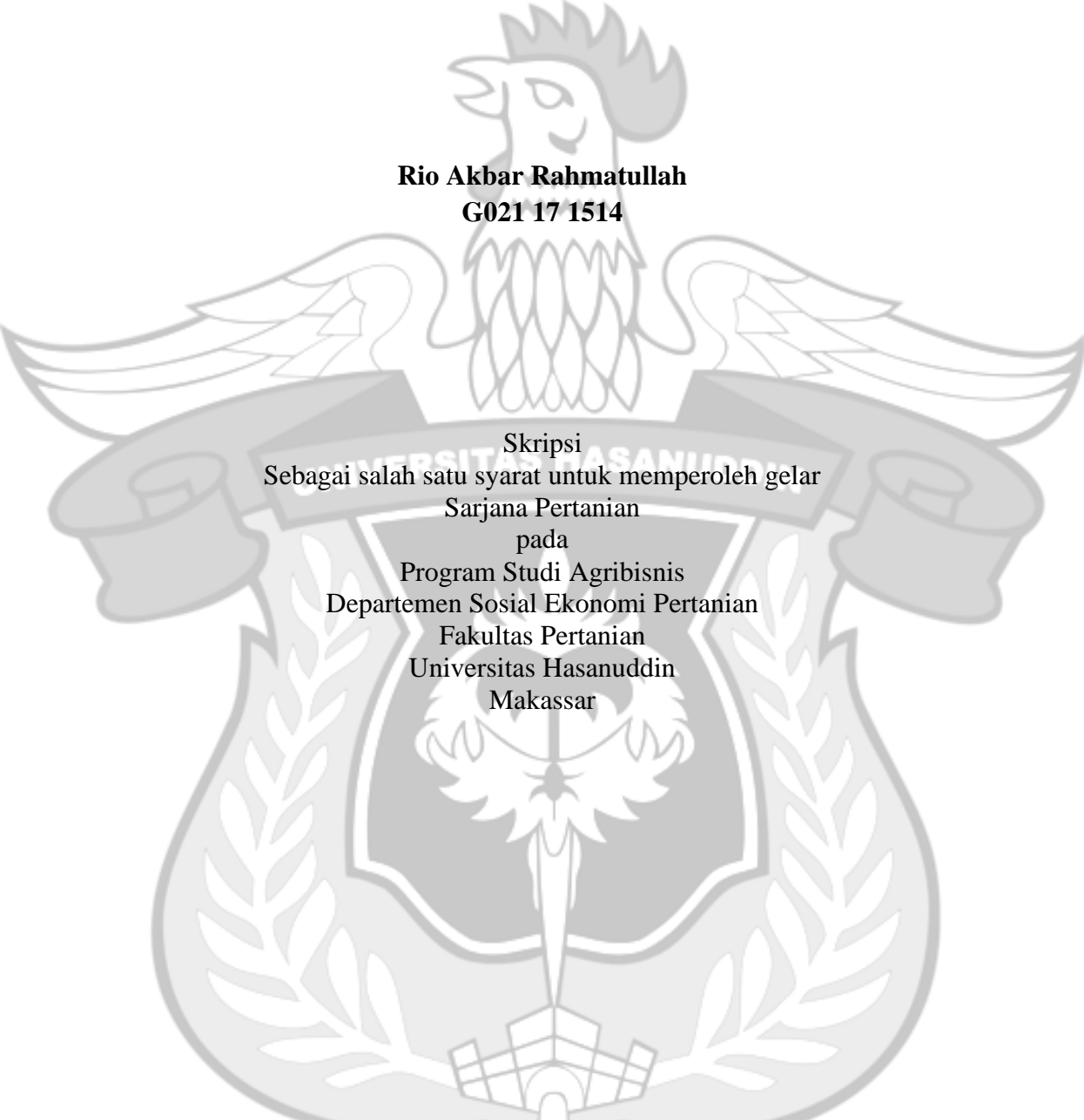
**RIO AKBAR RAHMATULLAH
G021 17 1514**



**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMIPERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**PERAN KELEMBAGAAN PERTANIAN UNTUK MENINGKATKAN
PRODUKSI KAKAO DI KABUPATEN PINRANG**

**Rio Akbar Rahmatullah
G021 17 1514**



Skripsi
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Pertanian
pada
Program Studi Agribisnis
Departemen Sosial Ekonomi Pertanian
Fakultas Pertanian
Universitas Hasanuddin
Makassar

**DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
PROGRAM STUDI AGRIBISNIS
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan
Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang
Nama : Rio Akbar Rahmatullah
NIM : G021 17 1514

Disetujui oleh:

UNIVERSITAS HASANUDDIN



Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D.

Ketua



Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, M.T.D.

Anggota

Diketahui oleh:



Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.

Ketua Departemen

Tanggal Lulus: 27 Oktober 2021

DEKLARASI

Dengan ini saya menyatakan bahwa, skripsi berjudul “Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang” benar adalah karya saya dengan arahan tim pembimbing belum pernah diajukan atau tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Saya menyatakan sumber informasi yang digunakan telah disebutkan didalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Makassar, 17 November 2021



Rio Akbar Rahmatullah
G021171514

ABSTRAK

RIO AKBAR RAHMATULLAH. Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang. Pembimbing: MUHAMMAD ARSYAD dan MUJAHIDIN FAHMID

Menurunnya produktivitas komoditas kakao dunia merupakan permasalahan yang terus terjadi di banyak negara penghasil kakao dalam lima tahun terakhir, tidak terkecuali Indonesia. Hal ini menunjukkan produksi kakao sedang dalam krisis. Oleh karena itu, menentukan aktor-aktor pemeran, tingkat kendala kelembagaan, serta bagaimana program-program strategis harus dirumuskan akan menjadi titik awal solusi dalam memulihkan tingkat produksi secara signifikan dan konsisten. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktor pemeran, faktor lemahnya kelembagaan, dan program strategis dalam meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Pinrang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam merancang kebijakan dan program strategis guna meningkatkan produksi kakao yang mampu bersaing baik di pasar nasional maupun internasional. Penelitian ini menggunakan *Interpretative Structural Modeling* (ISM) untuk merumuskan kompleksitas, hierarki (tingkatan), dan klasifikasi antar elemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dari 11 sub-elemen aktor terdapat 2 aktor yang merupakan aktor kunci, dari 10 faktor penyebab lemahnya kelembagaan terdapat 1 faktor yang merupakan faktor kunci, dan dari 11 unsur program strategis yang dikaji, terdapat tiga program strategis yang menjadi program kunci (DP=1,00) untuk meningkatkan produksi kakao. Artinya, aktor-aktor, faktor penyebab lemahnya kelembagaan, dan program-program tersebut harus dikerjakan secara simultan karena mereka saling terkait dan sangat diharapkan dapat mengatasi krisis produksi kakao di dalam negeri. Peran kelembagaan dalam produksi kakao di antaranya; membentuk alur koordinasi antar kelembagaan, pemberdayaan kelompok tani melalui penyuluhan, penyediaan sarana produksi, penyediaan pasar melalui kemitraan, dan penyediaan produksi berkelanjutan melalui pemanfaatan sarana produksi pertanian organik.

Kata Kunci: kebijakan pertanian; pembangunan pertanian; ISM; kakao

ABSTRACT

RIO AKBAR RAHMATULLAH. The Role of Agricultural Institutions to Increase Cocoa Production in Pinrang. Supervised by: MUHAMMAD ARSYAD and MUJAHIDIN FAHMID

The decline in world cocoa commodity productivity is a problem that continues to occur in many cocoa-producing countries in the last five years, Indonesia is no exception. This shows that cocoa production is in crisis. Therefore, determining the actors, the level of institutional constraints, and how strategic programs should be formulated will be the starting point for solutions in restoring production levels significantly and consistently. This study aims to determine the actors, weak institutional factors, and strategic programs in increasing cocoa production in Pinrang Regency. The results of this study are expected to be taken into consideration by local governments in designing strategic policies and programs to increase cocoa production that is able to compete in both national and international markets. This study uses Interpretative Structural Modeling (ISM) to formulate complexity, hierarchy (levels), and classification between elements. The results show that, of the 11 sub-elements of actors, there are 2 actors who are key actors, of the 10 factors that cause institutional weakness there is 1 factor which is a key factor, and of the 11 elements of strategic programs studied, there are three strategic programs that become key programs. (DP=1.00) to increase cocoa production. This means that the actors, the factors causing the weak institutions, and these programs must be carried out simultaneously because they are interrelated and are expected to be able to overcome the cocoa production crisis in the country. To conclude, roles of institutions in cocoa production are; shaping the flow of coordination between institutions, empowering farmer groups through extension, providing production inputs, provide a market through partnerships, and provide sustainable production through the use of organic agricultural inputs.

Keywords: *agriculture policy; agriculture development; ISM; cocoa.*

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Rio Akbar Rahmatullah, lahir di Pare-Pare pada tanggal 24 Februari 1999 merupakan anak bungsu dari dua bersaudara. Terlahir dari pasangan bapak **Sulaeman Fattah** dan ibu **Jasmawati**. Selama hidupnya penulis telah menempuh beberapa pendidikan formal, yaitu:

1. SD Inpres Tamalanrea I Tahun 2004-2011
2. SMP plus Al-Ashri Tahun 2011-2014
3. SMAN 2 Tinggimoncong Tahun 2014-2017

Selanjutnya dinyatakan lulus melalui jalur mandiri menjadi mahasiswa di Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2017 untuk jenjang pendidikan Strata Satu (S1). Selama menempuh pendidikan di Universitas Hasanuddin selain mengikuti kegiatan akademik, penulis bergabung dalam organisasi di lingkup fakultas yaitu LDF Surau Firdaus selama 2 tahun dan menjabat sebagai Koordinator pada periode 2018/2019. Penulis juga aktif di organisasi lingkup universitas yaitu UKM LDK MPM Unhas tahun 2020-2021. Penulis juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Peminat Sosial Ekonomi Pertanian (MISEKTA), selama berkuliah pernah memperoleh dana hibah PMW Tahun 2018.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan cahaya ilmunya, rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir pada Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu alaihi wasallam* yang telah menegakkan agama Islam di muka bumi ini serta menjadi tauladan yang baik bagi kita semua.

Skripsi ini berjudul **“Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang”** di bawah bimbingan Bapak **Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D.** dan Bapak **Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, MTD.** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Agribisnis, Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan, menyadari keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, dengan penuh rendah hati penulis mengakui bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis berharap semoga segala amal kebaikan dan bantuan dari semua pihak yang diberikan kepada penulis mendapat balasan setimpal dan bernilai ibadah disisi Allah SWT, dan semoga apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Makassar, 19 Oktober 2021

Penulis
Rio Akbar Rahmatullah

PERSANTUNAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah rabbil alamiin, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala* Rabb semesta alam, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya yang selalu terlimpahkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Kelembagaan Pertanian untuk Meningkatkan Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang”**. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada tauladan sepanjang masa, Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*, beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam ajarannya hingga akhir zaman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa ada bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan moril maupun materil. Pada kesempatan ini penulis ingin menghaturkan penghargaan yang istimewa, sebagai rasa cinta penulis persembahkan kepada Ayahanda **Sulaeman Fattah** dan Ibunda **Jasmawati**, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada keduanya yang telah membesarkan, mendidik, memberikan motivasi dengan penuh kasih sayang, kesabaran, ketulusan dan keikhlasan serta lantunan doa yang senantiasa dipanjatkan untuk anaknya selama ini hingga akhir hayatnya. Juga kepada kakak **Ahmad Misuari Gibran**, terima kasih atas segala doa dan segala bantuan yang telah diberikan selama ini.

Tidak sedikit kendala yang penulis hadapi dalam proses penelitian hingga penyelesaian skripsi. Namun, dengan tekad yang kuat serta bantuan dari berbagai pihak, maka kendala tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Dengan tidak mengurangi rasa empati dan hormat kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Ir. Muhammad Arsyad, SP., M.Si., Ph.D.** selaku pembimbing utama, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan saran mengenai berbagai hal. Meski di tengah kesibukan beliau senantiasa meluangkan waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis berharap semoga Bapak dan keluarga senantiasa dijaga oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.
2. Bapak **Prof. Dr. Ir. Mujahidin Fahmid, MTD.** selaku dosen pembimbing kedua, terima kasih atas waktu dan ilmunya, serta senantiasa membimbing dan memberikan masukan terhadap penulis. Semoga Bapak dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah *subhanahu wa ta'ala*.
3. Bapak **Prof. Dr. Ir. Darmawan Salman, M.S.** dan Bapak **Dr. Ir. Muh. Hatta Jamil, SP., M.Si.** selaku penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan skripsi ini. Semoga bapak dan keluarga senantiasa berada dalam lindungan Allah *subhanahu wa ta'ala*.
4. Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. Andi Nuddin, M.Si.**, atas diskusi dan arahannya dalam menyusun kuesioner dan elemen analisis, serta kepercayaannya dalam beberapa Survey Lapang Penelitian Kompetitif Nasional bertopik penguatan kelembagaan.
5. Ibu **Ni Made Viantika S, S.P., M. Agb.** dan Bapak **Achmad Amiruddin, S.P., M.Si.** selaku panitia seminar proposal dan seminar hasil, terima kasih banyak telah meluangkan

waktunya untuk mengatur jadwal seminar serta petunjuk dalam penyempurnaan tugas akhir ini. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah *subhanahu wa ta'ala*.

6. Ibu **Dr. A. Nixia Tenriawaru, S.P., M.Si.**, dan bapak **Ir. Rusli M. Rukka, M.Si.**, selaku Ketua Departemen dan Sekretaris Departemen Sosial Ekonomi Pertanian yang telah banyak memberikan semangat, pengetahuan, mengayomi, dan memberikan teladan selama penulis menempuh pendidikan. Semoga ibu dan bapak senantiasa diberkahi dan dilindungi oleh Allah SWT.
7. **Bapak dan Ibu dosen**, khususnya Program Studi Agribisnis Departemen Sosial Ekonomi Pertanian, yang telah mengajarkan banyak ilmu dan memberikan dukungan serta teladan yang baik bagi penulis selama menempuh pendidikan. Semoga ilmu yang telah diajarkan dicatat sebagai pahala kebaikan di sisi Allah *subhanahu wata'ala*.
8. Keluarga besar **Abdul Fattah rahimahullah** dan **Djemmang rahimahullah** yang telah memberikan dukungan kepada penulis.
9. Keluarga Besar **Mahasiswa Agribisnis Angkatan 2017 (AFIN17AS)**. Terima kasih telah menjadi saudara dan keluarga. Semoga Allah menjaga kita semua dan memberikan kemudahan dalam segala urusan.
10. Keluarga besar **LDF Surau Firdaus** dan **UKM LDK MPM Unhas** yang sudah menjadi sekolah sekaligus rumah bagi penulis. Penulis berharap *ukhuwah Islamiyah* di antara kita akan terus terjaga hingga kita dikumpulkan kembali di Surga-Nya kelak.
11. Keluarga **Rubel (Rumah Belakang); Amin Rais, Agung Wardiman, Abd. Fauzi Dachri, Ihramsyah, Farhan Maksam**, dan terkhusus untuk saudaraku **Zulfikri** yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis. Semoga Allah mengumpulkan kita di Surga-Nya kelak.
12. Murabbi/mentor kami Kak **Arfan Arifuddin, S.S.** yang banyak membimbing dan mengarahkan kami dalam perjalanan kami selama berkuliah, semoga Allah *ta'ala* senantiasa menjaga kakak sekeluarga.
13. Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang tak mampu penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih banyak.

Demikianlah dari penulis, semoga segala pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat kelak, Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 19 Oktober 2021

DAFTAR ISI

DEKLARASI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	viii
PERSANTUNAN	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
2. TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Pembangunan Pertanian	5
2.2 Program Peningkatan Produksi Kakao	6
2.3 Aspek Kelembagaan	8
2.4 Interpretative Structural Modelling (ISM)	10
2.5 Kerangka Pemikiran	10
3. METODE PENELITIAN	12
3.1 Desain Penelitian	12
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	12
3.3 Jenis dan Sumber Data	12
3.4 Tahapan Penelitian	12
3.5 Metode Analisis	15
4. HASIL DAN PEMBAHASAN	18
4.1 Gambaran Umum	18
4.2 Lembaga Pemeran	21
4.3 Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan	29
4.4 Program Strategis	35
5. KESIMPULAN	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	45
Lampiran 1. Kuesioner Penilaian Lembaga, Kendala, dan Program Strategis dengan ISM	45
Lampiran 2. Jawaban pakar penilaian lembaga	51
Lampiran 3. Jawaban pakar penilaian kendala koordinasi	52
Lampiran 4. Jawaban pakar penilaian program strategis	53
Lampiran 5. Penentuan level lembaga yang diharapkan berperan	54
Lampiran 6. Penentuan level kendala yang menyebabkan lemahnya peran kelembagaan	55
Lampiran 7. Penentuan level program strategis	56
Lampiran 8. Informan dalam Survei Lapangan	58
Lampiran 9. Narasumber, pakar, dan praktisi	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Produksi Kakao Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Pinrang 2016-2020.	1
Tabel 2. Elemen dan Sub-elemen yang Menjadi Bahan Kuesioner Penelitian.	13
Tabel 3. Bentuk hubungan kontekstual dan matematis antara sub-elemen i dan j.	16
Tabel 4. Luas Area Tanaman Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan dan Jenis Tanaman di Kabupaten Pinrang (ha) pada tahun 2016 sampai 2020.	18
Tabel 5. Produksi Perkebunan Kakao Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang (ton) pada tahun 2016 sampai 2020.	19
Tabel 6. Jumlah Petani Menurut Kecamatan di Kabupaten Pinrang pada Tahun 2016 sampai 2020.	20
Tabel 7. Jumlah Kelompok Tani Perkebunan di Kabupaten Pinrang Tahun 2019 sampai 2020	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Kerangka Pikir Penelitian	11
Gambar 2.	Diagram alur tahapan penelitian.	15
Gambar 3.	Structural Self-Interaction Matrix (SSIM).	16
Gambar 4.	Final Reachability Matrix.	16
Gambar 5.	Directional Graph Driver Power dan Dependence (DP-D).	17
Gambar 6.	SSIM Lembaga yang Diharapkan Berperan.	22
Gambar 7.	Initial Reachability Matrix Lembaga yang Diharapkan Berperan.	23
Gambar 8.	Final Reachability Matrix Lembaga yang Diharapkan Berperan.	23
Gambar 9.	Canonical Matrix Lembaga yang Diharapkan Berperan.	24
Gambar 10.	Directional Graph (DP-D) Lembaga yang Diharapkan Berperan.	25
Gambar 11.	Strukturisasi Level Lembaga yang Diharapkan Berperan.	26
Gambar 12.	SSIM Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan.	29
Gambar 13.	Initial Reachability Matrix Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan	30
Gambar 14.	Final Reachability Matrix Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan.	31
Gambar 15.	Canonical Matrix Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan.	31
Gambar 16.	Directional Graph (DP-D) Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan.	32
Gambar 17.	Strukturisasi Level Faktor-faktor Penyebab Lemahnya Peran Kelembagaan.	33
Gambar 18.	SSIM Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	35
Gambar 19.	Initial Reachability Matrix Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	35
Gambar 20.	Final Reachability Matrix Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	36
Gambar 21.	Canonical Matrix Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	36
Gambar 22.	Directional Graph (DP-D) Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	37
Gambar 23.	Strukturisasi Level Program Strategis Untuk Meningkatkan Produksi Kakao.	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Penilaian Lembaga, Kendala, dan Program Strategis dengan ISM	43
Lampiran 2	Jawaban pakar penilaian lembaga	49
Lampiran 3	Jawaban pakar penilaian kendala koordinasi	50
Lampiran 4	Jawaban pakar penilaian program strategis	51
Lampiran 5	Penentuan level lembaga yang diharapkan berperan	52
Lampiran 6	Penentuan level kendala yang menyebabkan lemahnya koordinasi	53
Lampiran 7	Penentuan level program strategi	54
Lampiran 8	Informan dalam survei lapangan	56
Lampiran 9	Narasumber, pakar, dan praktisi	56

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan potensi pertanian yang sangat besar. Besarnya potensi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah dan masyarakat. Jika peluang ini dimanfaatkan dengan baik, tentunya akan berdampak pada ketahanan serta kemandirian pangan nasional yang bukan hanya dapat menjaga kestabilan negara serta meningkatkan devisa negara melalui ekspor komoditas pertanian, tetapi juga dapat mengentaskan kemiskinan di tengah masyarakat. Namun, apabila pemerintah dan masyarakat gagal dalam menyadari dan memanfaatkan potensi ini, maka kemandirian pangan, peningkatan devisa atas ekspor pangan, serta kualitas hidup masyarakat yang baik tidak akan pernah terwujud di tengah masyarakat. Masyarakat yang sadar akan potensi besar ini tentunya akan memaksimalkan modal dan sumber daya yang dimilikinya untuk terus belajar guna meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pertanian yang berdaya saing di pasar internasional. Begitupun dengan pemerintah, jika seluruh perangkat pemerintah sadar akan besarnya potensi pertanian Indonesia dan peluang untuk menjadi pemasok bahan pangan untuk dunia, maka pemerintah seharusnya memberikan dukungan penuh kepada seluruh elemen yang terlibat dalam bidang pertanian dengan merencanakan serta menerapkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pembangunan pertanian.

Salah satu komoditas yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia adalah kakao (*Theobroma cacao L.*). Indonesia menempati urutan ketiga sebagai produsen kakao dunia dengan produksi sebanyak 767.280 ton pada tahun 2018. Indonesia berada di bawah Pantai Gading dan Ghana yang merupakan negara di kawasan Afrika Barat. Meskipun menempati peringkat yang tinggi, pada kenyataannya International Cocoa Organization (ICCO) menyatakan bahwa produksi kakao cenderung mengalami penurunan atau berada pada kondisi fluktuatif. Pendapat ICCO juga didukung dalam data yang dipublikasi oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang menunjukkan indikasi penurunan produksi kakao mulai dari skala nasional hingga skala kabupaten seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 (Manalu, 2018). Selain itu, kondisi mutu kakao Indonesia juga masih perlu menjadi perhatian bagi seluruh elemen yang terlibat dalam komoditas kakao melihat bahwa mutu kakao Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan kakao Afrika, terutama pada kakao yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat (Hadinata & Marianti, 2020).

Tabel 1. Produksi Kakao Indonesia, Sulawesi Selatan, dan Pinrang 2016-2020.

Wilayah	2016	2017	2018	2019	2020
Nasional	658.390	590.684	767.280	783.978*	739.483**
Provinsi Sulsel	114.276	100.391	124.952	118.775*	108.983**
Kabupaten Pinrang	12.280,5	11.067	19.585	7.565,56	11.099,6

Sumber : Direktorat Jenderal Perkebunan, BPS Kabupaten Pinrang 2021

Keterangan : *) Angka Sementara

***) Angka Estimasi

Sulawesi Selatan merupakan wilayah sentra produksi kakao di wilayah Indonesia Timur bersama dengan provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi

Selatan menempati urutan kedua sentra produksi kakao nasional dengan jumlah produksi sebanyak 124.952 ton pada tahun 2018. Meski berada di urutan kedua, Sulawesi Selatan merupakan provinsi terbesar dibandingkan dengan ketiga provinsi yang termasuk dalam lima besar sentra produksi kakao. Luas areal lahan perkebunan kakao di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2020 yakni seluas 195.980 ha dengan banyaknya petani menurut jenis tanaman perkebunan rakyat sebanyak 220.421 kepala keluarga. Oleh karena itu, Sulawesi Selatan memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sentra utama dalam produksi kakao nasional (BPS, 2021).

Kakao merupakan komoditas unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan sentra produksi meliputi beberapa kabupaten yakni Luwu Utara, Luwu, Wajo, Bone, dan Pinrang (Pusdatin, 2020). Kabupaten Pinrang menempati urutan kelima sebagai sentra produksi kakao di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memproduksi hingga 19.585 ton kakao pada tahun 2018. Namun, Pinrang juga masih menghadapi masalah dalam meningkatkan produksi kakao. Hal ini juga dibuktikan dari data pada Tabel 1 yang menunjukkan bahwa kondisi produksi yang fluktuatif juga terjadi pada kabupaten tersebut.

Pemerintah telah menunjukkan perhatiannya terhadap potensi komoditas kakao dengan melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan produksi kakao nasional mulai dari perluasan areal, kebijakan Bea Keluar (BK) tanam hingga Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (Gernas Kakao) yang dilaksanakan di 25 provinsi yang berlangsung pada tahun 2009-2014 (Utami, 2020). Kegiatan ini menargetkan perbaikan budidaya kakao yang terserang hama dan penyakit untuk kembali meningkatkan produktivitas dan mutu kakao nasional dengan melibatkan seluruh stakeholder dan sumber daya yang ada (Bartholomius, 2013). Adapun hasil pasca Gernas Kakao menunjukkan produksi dan mutu kakao nasional yang meningkat secara signifikan. Namun masalah terkait fluktuasi produksi kakao masih belum dapat diatasi sebagaimana pada Tabel 1 yang menunjukkan data produksi kakao yang masih fluktuatif sejak tahun 2016-sekarang (Depparaba & Karim, 2019).

Gernas Kakao menunjukkan hasil yang positif dalam peningkatan produksi dengan cara menyentuh dan memperbaiki aspek teknis usaha tani kakao (peremajaan, rehabilitasi, dan intensifikasi) serta melakukan pembinaan di tingkat kelembagaan petani. Hanya saja, pembinaan tersebut terkesan hanya sebagai formalitas dan bukan sebagai upaya pemberdayaan sehingga hasil yang diharapkan tidak optimal (Bartholomius, 2013). Perlu digaris bawahi bahwa keberhasilan pembangunan pertanian tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, melainkan juga ditentukan oleh aspek kelembagaan pertanian. Kelembagaan yang dimaksud di sini bukan hanya sekadar entitas yang hanya terbatas pada struktur organisasi, melainkan sebagai suatu sistem nilai, pranata, atau norma yang mengatur perilaku individu maupun kelompok di dalamnya dan telah diterima dalam aspek sosial di tengah masyarakat. Oleh karena itu, entitas kelembagaan dapat dipahami sebagai salah satu isu kompleks dalam pembangunan pertanian (Arsyad et al., 2021).

Dalam upaya membangun pertanian nasional yang berkelanjutan, peran kelembagaan sebagai suatu sistem nilai untuk menguatkan partisipasi setiap elemen dalam suatu lingkungan menjadi sangat penting. Karena pembangunan pertanian tidak hanya berbicara tentang kegiatan petani sebagai individu saja, tetapi juga mencakup perusahaan pertanian, transportasi, keuangan, dan lembaga-lembaga pemerintah (Wardhiani, 2019). Hal ini juga menjadi faktor yang sangat menentukan ketercapaian perubahan sosial masyarakat pertanian menuju tingkatan

yang lebih baik. Arifin dalam Arsyad (2020) menyampaikan bahwa revolusi pertanian 4.0 tidak hanya mensyaratkan peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia untuk menerapkan mekanisasi dalam bidang pertanian, tetapi juga aransemen kelembagaan yang diharapkan mampu menuju tingkat efisiensi dan efektivitas sistem rantai nilai dari hulu hingga hilir. Hal ini berarti aransemen kelembagaan pertanian sangat menentukan keberhasilan pembangunan pertanian di era industri 4.0.

Selain proses pembinaan yang melibatkan lembaga pertanian masih terpusat hanya pada skala tertentu dan cenderung hanya dianggap formalitas sehingga menimbulkan kurangnya partisipasi petani. Masih terdapat masalah-masalah lain yang dapat ditemukan dalam kelembagaan pertanian, seperti lemahnya kelembagaan petani kakao yang mengakibatkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam menghadapi sistem pasar yang ada karena struktur pasar kakao adalah oligopsoni (Nurhadi et al., 2019). Kemudian adanya lembaga yang tidak melembaga sehingga terjadi fenomena ego sektoral yang menjadikan konflik horizontal dan vertikal antar lembaga menjadi sesuatu yang umum terjadi (Jafar, 2016). Begitupun masalah kebijakan seperti pro kontra pengenaan Pungutan Ekspor (PE) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Adapun pada tingkat kabupaten, lembaga ekonomi yang ada di Pinrang seperti BUD dan KUD belum memaksimalkan fungsinya dalam memenuhi kebutuhan petani atas modal usaha. Selain itu petani di Kabupaten Pinrang juga memiliki persepsi yang tergolong masih kurang puas dengan kebijakan pembangunan pertanian yang ada serta hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang dinilai masih sangat kurang (Bahjad et al., 2019; Mursidin, 2016). Melihat permasalahan ini, keterlibatan pemerintah sangat diharapkan dalam meningkatkan infrastruktur, kesediaan dan keterjangkauan fasilitas produksi, penguatan kelembagaan petani, dan menjaga stabilitas pasar bagi petani (Fahmid et al., 2018).

Berdasarkan *issue* yang telah dipaparkan, maka penulis melihat akan perlunya penelitian yang menyajikan data dan informasi, pemetaan peran, serta strategi penguatan kelembagaan pertanian di Kabupaten Pinrang yang dapat dijadikan sebagai acuan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program peningkatan produksi dan mutu kakao yang mampu bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Kelembagaan Pertanian Untuk Meningkatkan Produksi Kakao di Kabupaten Pinrang”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana bentuk kelembagaan pertanian dalam program pengembangan kakao yang ada di Pinrang?
2. Kendala apa saja yang memengaruhi lemahnya peran kelembagaan dalam peningkatan produksi kakao?
3. Bagaimana program strategis dalam peningkatan produksi kakao?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi struktur dan aktor utama dalam program pengembangan kakao yang ada di Pinrang.
2. Mengidentifikasi kendala yang memengaruhi lemahnya peran kelembagaan dalam peningkatan produksi kakao di Kabupaten Pinrang.
3. Menentukan program strategis untuk meningkatkan produksi kakao di Kabupaten Pinrang.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang penguatan kelembagaan pertanian, terkhusus pada komoditas kakao. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam informasi dan wawasan mengenai strategi pengembangan usaha tani kakao serta dapat menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintah atau *stakeholder* terkait dalam menyusun desain perencanaan dan kebijakan pembangunan di bidang pertanian khususnya usaha tani kakao.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan Pertanian

2.1.1 Teori Pembangunan Pertanian

Definisi pembangunan pertanian sangat beragam dan terdapat banyak ahli yang merumuskannya sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Menurut (Azaki, 2019), pembangunan pertanian merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memperbanyak produksi pertanian sekaligus meningkatkan pendapatan serta produktivitas petani dengan meningkatkan kualitas maupun kuantitas dari produksi pertanian. Sementara menurut Banoewidjojo (1983) dalam (D.W, 2017), pembangunan pertanian adalah proses penciptaan perubahan sosial penduduk secara terus menerus terutama diarahkan pada segi-segi pertanian, masyarakatnya diajak maju sehingga semakin pandai, semakin terampil, bersemangat, dan tekun sehingga produktivitas pertanian semakin meningkat. Adapun menurut (Isbah & Iyan, 2016), pembangunan pertanian merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui investasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian. Berdasarkan beberapa pendapat ahli, maka dapat disimpulkan bahwa definisi pembangunan pertanian mencakup beberapa poin yaitu; (1) Pembangunan pertanian sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, (2) Pembangunan pertanian bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas petani, (3) Merupakan serangkaian perubahan sosial masyarakat tani yang berkelanjutan, dan (4) Memerlukan dukungan dalam penggunaan teknologi, pembangunan infrastruktur, dan penguatan kelembagaan.

Hadisapoetro (1975) dalam (Yuwono et al., 2016) menjelaskan bahwa pembangunan pertanian menghasilkan perubahan-perubahan: (1) dalam susunan kekuatan dalam masyarakat, (2) dalam produksi, produktivitas dan pendapatan, (3) dalam alat-alat dan bahan produksi, (4) dalam tujuan ekonominya dari subsisten ke komersial, dan (5) dalam corak sosial dari tutup ke arah terbuka. Jadi pembangunan pertanian turut memiliki kepentingan pada perubahan-perubahan yang berhubungan dengan masyarakat tani secara khusus maupun masyarakat secara umum. Jika membahas tentang perubahan yang berhubungan dengan masyarakat, maka minimal akan mencakup pembahasan terkait pertumbuhan (*growth*), kemiskinan (*poverty*), kesempatan kerja (*employment*), pemerataan (*equity*) dan aspek sosial budaya. Oleh karena itu, dalam mengukur pembangunan pertanian diperlukan pengukuran selain efisiensi ekonomi dan produksi, yakni pengukuran kemiskinan, pengangguran, pemerataan, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan budaya.

2.1.2 Indikator Keberhasilan

Kompleksitas indikator pembangunan sangat bergantung pada tingkat perkembangan masyarakat (*urbanisasi*, *modernisasi*, dan *industrialisasi*). Jika masyarakat semakin berkembang, maka semakin dibutuhkan pula indikator yang terperinci dan canggih. Adapun hal yang mendukung dalam penerapan pengukuran indikator pembangunan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketersediaan data statistik dan pelayanan yang efektif dan efisien dari

pemerintah. Sebagai tambahan, pengukuran spesifik dan mendalam yang dimaksud terhadap kinerja pembangunan pertanian hanya dapat dikembangkan oleh pakar yang mendalami adat dan tradisi setempat.

Soekarwati (1995) dalam (D.W, 2017) menyatakan bahwa pembangunan pertanian dapat dikatakan berhasil apabila terjadi pertumbuhan sektor pertanian yang tinggi disertai perubahan masyarakat tani menjadi lebih baik. Pada dasarnya pembangunan pertanian tidak hanya berfokus pada aspek produksi saja, tetapi perlu diiringi dengan perubahan pada masyarakat tani. Keberhasilan tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan beberapa faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, penggunaan teknologi, dan penguatan kelembagaan yang secara sinergis mampu menggerakkan pembangunan pertanian untuk meningkatkan produksi pertanian. Namun perlu dipahami bahwa tercapainya peningkatan produksi pertanian tidak secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani. Kesejahteraan petani juga sangat bergantung pada peran pemerintah daerah dalam upaya menjamin ketersediaan akan pasar dari produksi pertanian, hal ini dapat dilakukan melalui pemenuhan serta pengembangan sarana dan prasarana pertanian maupun pemasaran hasil-hasil pertanian (Azaki, 2019).

2.1.3 Tahapan Perencanaan Pembangunan Pertanian

Membangun pertanian tidak dapat dilakukan secara sembarangan, kurangnya analisis dan pemahaman yang mendalam terhadap wilayah yang menjadi target pembangunan dapat berdampak pada terhambat atau gagalnya proses pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan tahapan yang sistematis dalam merencanakan pembangunan pertanian. Banoewidjojo (1983) dalam (D.W, 2017) menjabarkan tahapan-tahapan rencana pembangunan pertanian sebagai berikut:

- (a) Menetapkan tujuan atas dasar pertimbangan keadaan;
- (b) Membuat analisis masalah-masalah yang akan timbul, sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan;
- (c) Memecahkan masalah-masalah dan memilih alternatif yang paling memungkinkan di antara jawaban masalah-masalah tersebut;
- (d) Mengatur segala sarana berdasarkan alternatif jawaban masalah-masalah yang telah dipilihnya itu, dengan tepat menurut jenis, jumlah, tempat, dan waktu dalam bentuk rencana;
- (e) Mencoba melaksanakan rencana; dan
- (f) Membuat perubahan-perubahan berdasarkan hasil-hasil percobaan.

2.2 Program Peningkatan Produksi Kakao

Selama ini pemerintah telah melakukan berbagai program untuk mengupayakan peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman kakao yang berkelanjutan. Kegiatan seperti Pengembangan Revitalisasi Kakao, Pengembangan Kakao Non Revitalisasi, Pengembangan Integrasi Kakao-Ternak, atau program Gerakan Nasional Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao (GERNAS). Gernas Kakao yang dilaksanakan pada tahun 2009-2014 merupakan upaya pemerintah dalam mendukung peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan seluruh potensi pemangku kepentingan serta sumber daya yang ada di sentra kakao yang terkena serangan hama dan penyakit dengan

kategori sedang sampai dengan berat (Dirjen Perkebunan, 2013).

Berikut adalah beberapa permasalahan yang melatarbelakangi program pengembangan kakao:

- (1) Penurunan produktivitas akibat sebagian besar tanaman tua/rusak, belum menggunakan bibit unggul, kurangnya perawatan tanaman, serangan OPT utama (VSD dan PBK);
- (2) Rendahnya tingkat diseminasi teknologi akibat minimnya tenaga penyuluh, luas cakupan wilayah, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung;
- (3) Kualitas biji kakao masih rendah;
- (4) Ekspor sebagian besar dalam bentuk bahan baku atau biji sehingga tidak ada nilai tambah pada kakao;
- (5) Kelembagaan petani belum kuat;
- (6) Terbatasnya akses terhadap permodalan;
- (7) Masih terbatasnya kemitraan antara pengusaha/industri dengan petani;
- (8) Tata niaga kakao yang masih panjang (didominasi oleh tengkulak).

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan, dapat diidentifikasi bahwa persoalan kelembagaan menjadi salah satu hal yang harus diatasi untuk meningkatkan produktivitas kakao. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut dibuatlah kebijakan umum dan teknis dalam Gernas kakao. Kebijakan umum menekankan untuk mensinergikan seluruh potensi sumber daya tanaman kakao dalam rangka peningkatan daya saing usaha, nilai tambah, produktivitas dan mutu produk, melalui partisipasi aktif para pemangku kepentingan dan penerapan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan berlandaskan kepada ilmu pengetahuan dan teknologi serta didukung dengan tata kelola pemerintah. Kebijakan umum ini menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi yang kuat antar kelembagaan yang diharapkan berperan dalam upaya pengembangan komoditas kakao.

Pada Kebijakan teknis pengembangan kakao terbagi dalam beberapa poin di antaranya; (1) Pengembangan komoditas kakao; (2) Peningkatan kemampuan sumber daya manusia; (3) Pengembangan kelembagaan dan kemitraan; (4) Peningkatan investasi usaha, dan; (5) Pengembangan sistem informasi manajemen. Dapat dilihat bahwa pengembangan kelembagaan menjadi poin tersendiri dalam kebijakan teknis. Hal ini menandakan pentingnya penguatan kelembagaan dalam mendukung program pengembangan kakao.

Meskipun program sebesar Gernas Kakao memiliki pedoman yang jelas, disertai pemetaan pemangku kepentingan atau organisasi yang diharapkan berperan dari tingkat pusat hingga lapangan sebagai pelaksana harian maupun tim koordinasi, tetapi program ini mengalami kegagalan dan harus dihentikan pada tahun 2014. Masalah pertama yang menyebabkan diberhentikannya Gernas Kakao yakni pengadaan bantuan bibit dan pupuk yang seringkali tidak tepat waktu dan mutu, serta kurangnya pengawasan dalam pelaksanaan Gernas Kakao. Masalah kedua berdasarkan pada hasil kajian Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) yang menunjukkan bahwa sebagian besar petani kurang memahami program Gernas Kakao, khususnya terkait dengan teknologi bibit SE (somatic embryogenesis) dan metode sambung samping dan sambung pucuk, sehingga banyak yang gagal dalam kegiatan peremajaan. Saran atas masalah ini yakni pemda mendorong tenaga penyuluh setempat untuk meningkatkan frekuensi interaksi dengan petani. Hasil yang diharapkan dari pendampingan

yang intens adalah transfer pengetahuan yang efektif dan mendalam kepada petani. Selain itu, juga terdapat masalah pada sektor hilir (pengolahan) yang bersumber dari perspektif petani terkait anggapan bahwa proses fermentasi kakao tidak memberikan insentif yang signifikan dan hanya memberikan beban kerja yang lebih besar. Oleh karena itu, penyuluhan perlu dilakukan agar petani memiliki persepsi yang sama dengan pemerintah dalam melaksanakan program pengembangan kakao (Purwantini, 2020). Pada intinya, diperlukan penguatan dan koordinasi yang baik antar kelembagaan untuk mendukung keberhasilan suatu program.

2.3 Aspek Kelembagaan

2.3.1 Kelembagaan

Kelembagaan (*institution*) merupakan istilah yang sering dikaitkan dengan organisasi yang memiliki struktur dan berorientasi pada peran (*role*), padahal terdapat hal yang membedakan keduanya. Menurut North (1990) kelembagaan merupakan aturan main (*rules of game*) dalam masyarakat, kelembagaan dapat dimaknai sebagai batasan yang dirancang manusia untuk membentuk interaksi manusia. Kemudian menurut Bartholomius (2013), kelembagaan berfokus terhadap seperangkat aturan yang mengatur perilaku masyarakat dalam mencapai kebutuhan penting dalam kehidupannya, sedangkan organisasi fokusnya adalah struktur yang merupakan hasil dari interaksi formal maupun informal dari sejumlah peran. Adapun menurut Soekanto (2001) dalam (Setiawan et al., 2017), kelembagaan adalah himpunan norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kelembagaan tidak sekadar berbicara tentang aspek organisasi atau struktur semata, tetapi di dalamnya mencakup aturan atau norma-norma yang menjadi pegangan bagi individu maupun kelompok yang ada di tengah masyarakat untuk mencapai tujuan. Adapun makna kelembagaan dalam penelitian ini yakni hanya berfokus pada aspek organisasinya dengan melihat peran kelembagaan pertanian (organisasi, instansi, dan kelompok) dalam meningkatkan produksi kakao.

Berdasarkan definisi kelembagaan oleh para ahli, dapat dipahami bahwa dalam upaya mengimplementasikan kebijakan atau program pemerintah untuk mendorong produktivitas pertanian, pengembangan aspek kelembagaan juga termasuk strategi yang perlu dipertimbangkan. Sebagaimana menurut (Bartholomius, 2013) bahwa pengembangan kelembagaan merupakan strategi utama yang selalu dipakai dalam program-program pembangunan pedesaan di dunia, termasuk seluruh departemen di Indonesia. Melihat vitalnya peran kelembagaan dalam program pembangunan, maka penguatan kelembagaan perlu dilakukan tidak hanya di tingkat nasional tetapi juga di tingkat lokal. Dalam pembangunan, dapat dipastikan bahwa kelembagaan yang ideal adalah lembaga formal yang melembaga, yakni lembaga yang mampu menghasilkan suatu perubahan serta merawat keberlangsungan perubahan tersebut.

2.3.2 Prinsip Dasar Kelembagaan

Dradjat (2006) dalam (Jafar, 2016) menjelaskan bahwa kelembagaan dibangun atas tujuh prinsip dasar:

1. Prinsip kebutuhan, yakni kelembagaan yang dibangun dibutuhkan secara fungsional.

Tidak dipaksakan keberadaannya apabila fungsi-fungsi dalam subsistem agribisnis telah memenuhi kebutuhan.

2. Prinsip efektivitas, pahami bahwa kelembagaan hanyalah sebuah alat untuk mencapai tujuan. Jika kita memahami kelembagaan sebagai alat, maka elemen kelembagaan yang dikembangkan di setiap subsistem agribisnis haruslah efektif untuk mencapai tujuan.
3. Prinsip efisiensi, efisiensi dalam penguatan kelembagaan berarti memilih alternatif pilihan yang relatif paling murah, mudah, dan sederhana namun tetap mampu mendukung dalam pencapaian tujuan.
4. Prinsip fleksibilitas, kelembagaan yang dikembangkan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia dan budaya setempat.
5. Prinsip manfaat, kelembagaan yang dikembangkan harus mampu memberikan manfaat paling besar bagi petani dan masyarakat pedesaan.
6. Prinsip pemerataan, kelembagaan yang dikembangkan mampu memberikan pembagian keuntungan atau manfaat secara proporsional kepada petani, dan
7. Prinsip keberlanjutan, kelembagaan diharapkan terus berjalan meskipun lembaga penunjang secara langsung telah berkurang keterlibatannya.

2.3.3 Penguatan Kelembagaan Pertanian

Kajian tentang penguatan kelembagaan pertanian dimaksudkan untuk mengungkap apakah penguatan kelembagaan pertanian merupakan hal yang penting untuk memperkuat komitmen pengelolaan potensi sumberdaya. Selain itu, kajian tentang penguatan kelembagaan pertanian juga diharapkan dapat memberikan model koordinasi yang efektif antar lembaga dari berbagai sektor agar mereka dapat memanfaatkan sumber daya secara optimal. (Arsyad et al., 2019) dalam bukunya Model Kelembagaan Pertanian untuk Wilayah Perbatasan Indonesia menuliskan bahwa kunci keberhasilan pengelolaan potensi sumberdaya lokal terdapat di kelembagaan lokal pada tingkat kabupaten. Sebagai tambahan, penguatan kelembagaan untuk pengelolaan potensi sumberdaya lokal sebaiknya difokuskan pada lembaga-lembaga yang ada di daerah perbatasan (kabupaten/kota) karena hubungan struktural serta kedekatan emosional dengan sumberdaya yang ada di daerah perbatasan lebih dirasakan oleh lembaga-lembaga pada tingkat kabupaten.

Penguatan kelembagaan petani sangat penting karena beberapa alasan, yaitu: (1) Banyak masalah pertanian yang dapat diselesaikan oleh lembaga petani, (2) Memberikan keberlanjutan usaha penyebaran teknologi dan pengetahuan teknis kepada petani, (3) Mempersiapkan petani untuk bersaing dalam struktur ekonomi yang lebih terbuka, dan (4) Mewadahi kerja sama bagi petani yang dapat mendorong penggunaan sumber daya petani menjadi lebih efisien (Listiyati et al., 2014).

Elizabeth dalam (Bartholomius, 2013) menyatakan bahwa terdapat tuntutan perubahan operasional tiga pilar kelembagaan: (1) Kelembagaan lokal tradisional yang eksis dalam komunitas, (2) kelembagaan pasar (private sector) yang dijiwai ideologi ekonomi terbuka, dan (3) kelembagaan sistem politik atau pengambilan keputusan di tingkat publik (public sector). Ketiga pilar tersebut diharapkan dapat bersinergi dan melakukan perubahan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang senantiasa mengalami perkembangan. Hal inilah yang dimaksud dengan transformasi kelembagaan sebagai upaya pemberdayaan yang dilakukan

secara internal dan eksternal (tata hubungan) dari keseluruhan kelembagaan yang ada.

2.4 Interpretative Structural Modelling (ISM)

Untuk mengetahui kelembagaan apa saja yang diharapkan berperan dalam upaya peningkatan produksi kakao dan untuk mendapatkan kualitas usulan program strategis yang lebih tepat, diperlukan model struktur dan keterkaitan antara kelembagaan maupun antara kebijakan. Kedua hal ini dapat dicapai dengan menggunakan metode Interpretative Structural Modelling (ISM). ISM merupakan suatu alat berbasis komputer yang dapat membantu kelompok mengidentifikasi dan menyimpulkan berbagai macam hubungan antara faktor-faktor dalam suatu masalah atau isu kompleks, bentuk dari metode ini adalah fokus proses pembelajaran (focus learning process) (Maharani, 2019; Munawir, 2021; Prasetyaningtyas, 2019; Raharja et al., 2020).

Prinsip dasar dari metode ISM adalah mengidentifikasi struktur sistem yang kompleks dan merumuskan sistem pengambilan keputusan yang efektif. Berdasarkan identifikasi struktur dalam suatu sistem yang kompleks inilah yang nantinya akan memberikan manfaat yang bernilai tinggi untuk merumuskan sistem secara efektif untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik (Munawir, 2021; Raharja et al., 2020). ISM berfokus untuk memecah sistem yang kompleks menjadi beberapa subsistem sederhana dan memberikan pemahaman dasar tentang situasi yang kompleks, serta membangun tindakan yang tepat untuk memecahkan masalah. Teknik ISM mampu mengubah model sistem yang masih tidak jelas menjadi model sistem yang terlihat (visible). Adapun tiga hal yang dihasilkan metode ISM meliputi: (1) Elemen kunci, (2) Struktur hierarki elemen, dan (3) Pengklasifikasian elemen ke dalam empat sektor (Maharani, 2019; Prasetyaningtyas, 2019).

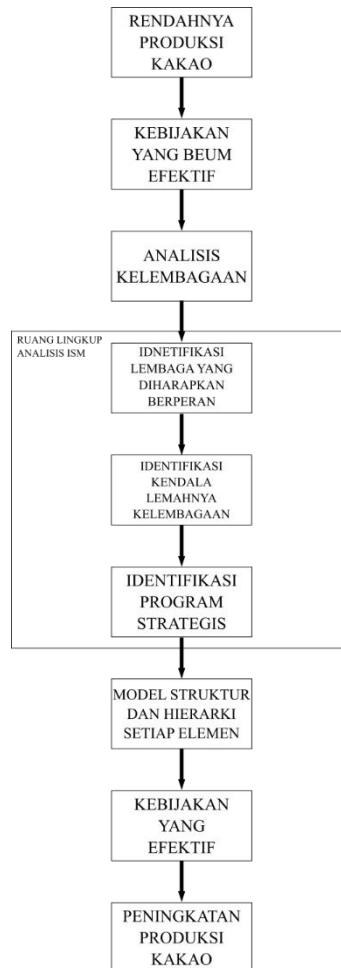
Elemen kunci dalam program kelembagaan dibagi menjadi sembilan elemen: 1) Tujuan program, 2) Persyaratan program, 3) Masalah utama program, 4) Tolok ukur untuk menilai tujuan, 5) Lembaga yang terlibat, 6) Masyarakat yang terdampak, 7) Kemungkinan perubahan, 8) Kebutuhan aktivitas, dan 9) Pengukuran aktivitas. Pada penelitian ini, elemen yang akan diidentifikasi elemen kuncinya yakni: (1) Lembaga yang terlibat, (2) Masalah program, dan (3) Kemungkinan perubahan/program strategis (Raharja et al., 2020).

2.5 Kerangka Pemikiran

Rendahnya produksi disertai produktivitas lahan yang fluktuatif pada komoditas kakao menjadi masalah yang membuat pemerintah perlu mengambil kebijakan strategis untuk kembali meningkatkan produktivitas komoditas tersebut. Berbagai kebijakan telah dilaksanakan untuk mengupayakan peningkatan produksi, namun sampai saat ini masih belum ada yang menunjukkan hasil yang sesuai harapan. Setelah dilakukan evaluasi terhadap program yang ada, kemudian diidentifikasi bahwa lemahnya kelembagaan menjadi salah satu faktor yang berdampak pada rendahnya produksi kakao.

Analisis terhadap kelembagaan menjadi urgensi untuk mengetahui aktor kunci serta lembaga mana yang diharapkan berperan dalam program peningkatan produksi kakao. Selain itu, analisis terhadap aktor juga akan menghasilkan hierarki yang jelas dalam suatu sistem untuk mempermudah pembuat kebijakan dalam merencanakan program. Selain mengidentifikasi lembaga yang berperan, juga perlu diketahui kendala-kendala yang mengakibatkan lemahnya

peran kelembagaan serta program strategis dalam upaya peningkatan produksi kakao. Hal ini dilakukan untuk menyediakan suatu model yang dapat mendukung dalam perencanaan suatu program yang dapat meningkatkan produksi komoditas kakao sekaligus menguatkan kelembagaan.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian